

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2026			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		130,271,000		130,271,000
	Sasaran Program : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan				
	Indikator Kinerja Program :				
04	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu				
04.01	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu				
04.02	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer				
04.03	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.04	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.05	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.06	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer				
04.07	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer				
04.08	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer				
04.09	Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer				
04.10	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.11	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.12	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.13	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.14	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.15	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.16	Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.17	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.18	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau				
12	Indikator Kinerja Program :				
12.01	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer				
12.02	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2026			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sasaran Program : Indikator Kinerja Program : 12.03 Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal 14 Indikator Kinerja Program : 14.01 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer 14.02 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 14.03 Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani 1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				
			130,271,000		130,271,000
	Indikator Kinerja Kegiatan : 1059.AEA Koordinasi [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 002 Dukungan Penyelesaian Perkara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 1059.BCA Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara 1059.QBA [SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 02 Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum 1059.QCA Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 1.00 Perkara, Berkas Perkara 1.00 Perkara 96.00 Orang 96.00 Orang 2.00 Perkara, Berkas Perkara 2.00 Perkara	12,000,000 12,000,000 405,000 405,000 33,216,000 33,216,000 84,650,000 84,650,000		12,000,000 12,000,000 405,000 405,000 33,216,000 33,216,000 84,650,000 84,650,000

Jayapura, 1 Januari 2026

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005) **MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**
PROGRAM : (005.05.BF) **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
SATUAN KERJA : (539139) **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
PROPINSI : (25) **PAPUA**
LOKASI : (51) **KOTA JAYAPURA**

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2026				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		130,271,000		130,271,000		
	<u>Sasaran Program :</u>						
04	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
04.01	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu						
04.02	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu						
04.03	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer						
04.04	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.05	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.06	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.07	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer						
04.08	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer						
04.09	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer						
04.10	Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer						
04.11	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.12	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.13	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.14	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.15	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.16	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.17	Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.18	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
12	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
12.01	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer						
12.02	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
12.03	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan						
12.04	Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani						
14	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
14.01	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di						

BAGIAN-B

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2026				SD/ CP	KPI/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
14.01 14.02 14.03 1059	Lingkungan Peradilan Militer Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (Fungsi/Sub Fungsi: 03.04)		130,271,000		130,271,000		
1059.AEA	Koordinasi [Base Line]	1 kegiatan	12,000,000		12,000,000		KD
1059.AEA.002	Lokasi : KOTA JAYAPURA Dukungan Penyelesaian Perkara	1.0 kegiatan	12,000,000		12,000,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		12,000,000		12,000,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		12,000,000		12,000,000		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line]	1 Perkara, Berkas Perkara	405,000		405,000		KD
1059.BCA.001	Lokasi : KOTA JAYAPURA Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.0 Perkara	405,000		405,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		405,000		405,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		405,000		405,000		
1059.QBA	[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line]	96 Orang	33,216,000		33,216,000		KD
1059.QBA.001	Lokasi : KOTA JAYAPURA Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96.0 Orang	33,216,000		33,216,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		33,216,000		33,216,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		33,216,000		33,216,000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
PROGRAM : (005.05.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2026				SD/ CP	KPI/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line]	2 Perkara, Berkas Perkara	84,650,000		84,650,000		KD
1059.QCA.002	Lokasi : KOTA JAYAPURA Perkara Yang Dilayani Melalui Sidang Di Luar Gedung Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.0 Perkara	84,650,000		84,650,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		84,650,000		84,650,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		84,650,000		84,650,000		

TOTAL	2026	2025
RM	130,271,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	130,271,000	

Jayapura, 1 Januari 2026

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002